

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik internasional tidak bisa dilepaskan dari konflik, baik konflik antar negara ataupun konflik yang terjadi di dalam negara yang dikenal dengan perang sipil atau *civil war*. Konflik di wilayah Laut China Selatan (LCS) menjadi konflik yang masih mengemuka pada akhir dekade 2020-an. Konflik ini menjadi menarik karena berkaitan dengan show of force, serta melibatkan negara-negara dengan kekuatan militer yang cukup besar. (Bhat,2020:0)

Dalam konflik LCS adalah terdapat beberapa negara utama yang terlibat yaitu China. Negara ini merupakan salah satu negara berpengaruh baik dalam kawasan Asia Timur, benua Asia, maupun dunia internasional secara luas. Pengaruh secara politis, ekonomi, dan kebudayaan yang bercorak komunisme sosialis tersebar ke dalam setiap interaksi China pada sistem global. Secara geografis, lokasi China terletak di kawasan Asia Timur yang memiliki koordinat 35 00 U dan 105 00 T, berbatasan dengan Laut China Timur, Teluk Korea, Laut Kuning, Laut China Selatan, dan terletak di antara Vietnam dan Korea Utara. (Veck,2011:17)

Dalam konflik LCS terdapat juga negara lainnya yang terlibat yaitu Jepang. Negara ini merupakan negara yang demokratis, yang diwujudkan melalui sistem demokrasi parlementarian representatif, sedangkan keberadaan Kaisar Jepang merupakan perwujudan dari simbol negara, sekaligus pelestari nilai-nilai

sosio-kultural negara ini atau dengan kata lain, fungsi kaisar adalah sebagai “lambang negara dan persatuan rakyat”. Sedangkan bidang pertahanan Jepang tidak lepas dari Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF, *Japan Self Defense Force*) yaitu pasukan militer terpadu yang didirikan pasca perang Dunia II. Institusi ini terdiri dari 27 juta personel yang terdiri atas tiga sub departemen, yaitu Matra Darat, Maritim, Udara dan Kantor Pusat Gabungan. Keberadaan perdana menteri Jepang memiliki peranan penting dalam JSDF karena mengkomandoi seluruh matra tersebut. (cfr.org)

Hubungan antara China dan Jepang ditinjau dari faktor historis cenderung buruk. Keterlibatan Jepang pada perang dunia II dengan menjadikan Cina sebagai obyek kolonialisme menjadi isu sentral yang tidak kunjung terselesaikan. Upaya China untuk meminta maaf dan berbagai kompensasi ternyata tidak kunjung dipenuhi oleh pihak Jepang. Sebagai contoh tahun 1993, permintaan maaf Jepang terhadap China ternyata tidak di dukung oleh semua partai politik yang ada di parlemen (diet) Jepang. (bbc.com)

LCS merupakan salah satu wilayah penting dalam jalur pelayaran internasional. Wilayah perairan ini terbentang dari Selat Karimata (Indonesia), Selat Malaka (Singapura) hingga Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km. LCS menjadi jalur perairan yang sangat penting karena pada dekade 2010-an menjadi lalu lintas seperempat pelayaran niaga dunia atau sekitar 21 ribu perbulan.(lowyinstitute.org) Geografis LCS lihat peta 1.1. sebagai berikut :

Peta 1.1.
Wilayah Geografis Laut China Selatan



Sumber : Diolah dari Nations Online, “Political Maps of South China Sea”, di download dari <https://www.nationsonline.org/oneworld/map/South-China-Sea-political-map.htm>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

Konflik LCS merupakan salah satu konflik terpanjang dan terkompleks dalam sepanjang sejarah. Persoalan ini belum terselesaikan secara mendasar pada tahun 2018-2020, bahkan pada akhir tahun 2020 Tiongkok semakin agresif dalam mengembangkan kekuasaannya di LCS. Di sisi lain bentang perairan LCS ternyata berseberangan dengan zona UNCLOS negara lain, diantaranya Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan beberapa negara lainnya, termasuk Jepang. (lowyinstitute.org)

Ini disebabkan hubungan Tiongkok dan Jepang dari sisi historis, serta politik terkini cenderung fluktuatif dan memburuk. Kebijakan China melalui modernisasi bidang pertahanan dan persenjataan, baik darat ataupun laut melalui *blue water doctriination* akan menjadi ancaman bagi eksistensi politik-keamanan Jepang pada tahun 2018-2020.

Agresifitas China dalam konflik LCS juga disingkapi secara serius oleh Jepang pada era kepemimpinan Shinzo Abe dan terus bertransformasi hingga kepemimpinan Yoshihide Suga. Pemerintah Jepang pada tahun 2018 secara resmi menyatakan bahwa :

“...perkembangan militer China secara besar-besaran menjadi hal yang lazim terjadi bagi negara manaun yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang pesat dan ini menjadi perhatian bagi Jepang, namun ketika China mengembangkan kekuatan militernya untuk mendukung eksistensi ambisinya maka ini akan berubah menjadi sebuah ancaman bagi negara manapun dan juga bagi Jepang.”(dspace.mit.edu)

Pernyataan pemerintah Jepang tersebut menunjukkan bahwa kemajuan China di bidang ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya merupakan hal yang rasional sebagai wujud pengembangan pembangunan dalam dan luar negeri secara sistematis dan berkesinambungan pasca penerapan gagasan politik pintu terbuka (*kaifang zhengzi*). Pada bidang pertahanan dan militer kemajuan China ini justru menjadi ancaman bagi negara-negara lain, termasuk Jepang. Atas kondisi inilah Jepang kemudian menjalankan respon secara proporsional dengan memperhatikan berbagai konstelasi politik dalam dan luar negeri.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu :

“Bagaimana respon Jepang dalam menghadapi agresifitas China pada konflik Laut China Selatan tahun 2018-2020 ?”

C. Kerangka Dasar Teori

Dalam menjawab rumusan masalah dan menarik hipotesa maka digunakan dua pendekatan yang relevan yaitu teori kebijakan pertahanan. Pendekatan ini relevan dengan respon Jepang dalam menghadapi agresifitas China pada konflik Laut China Selatan tahun 2018-2020 .

Penerapan suatu kebijakan pertahanan luar negeri memiliki konsekuensi yang luas, baik dalam lingkup domestik ataupun internasional. Istilah penerapan kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan hukum dan proposal. Padahal sesungguhnya istilah kebijakan itu memiliki definisi dan pengertian tersendiri yang berbeda. Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada definisi yang berbeda menyatakan bahwa menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam buku *Labyrinths of Democracy*, kebijakan yaitu :

“Kebijakan adalah sebuah keputusan yang bersifat tetap yang akan dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari para pembuat kebijakan/stakeholder yang membuat kebijakan itu sendiri dan dari mereka, serta kelompok-kelompok di bawahnya yang kemudian mematuhi keputusan tersebut”.(Athlaus,2007:2)

Kebijakan pertahanan pasca berakhirnya perang dingin (*cold war*) telah membentuk struktur baru, dimana terjadi penyebaran diaspora bagi aktor-aktor politik-keamanan yang terlibat. Dengan kata lain aktor-aktor politik-keamanan tidak hanya terbagi atas dua kubu kelompok besar, namun semakin banyak aktor yang terlibat yang memiliki potensi dan kekuatan baru dalam aspek ekonomi, politik dan militer. (Buzan and Weaver,2002:37)

Kebijakan pertahanan dijalankan suatu negara dengan memperhatikan kekuatan, kapasitas kerjasama luar negeri hingga legitimasi yang berasal dari kelompok kepentingan, partai politik hingga gagasan dari pemimpin suatu negara. Menurut Barry Buzan kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh suatu negara memiliki tiga utama, masing-masing yaitu :

- a. Kebijakan pertahanan akan dapat membangun superioritas dari negara-negara lawan.

Kebijakan pertahanan merupakan lingkaran-lingkaran atas dinamika kausalitas dalam tatanan keamanan internasional. Artinya suatu negara menjalankan kebijakan sebagai respon untuk mempertahankan diri dari negara lain dan negara lain tersebut akan menjalankan berbagai penyesuaian. Dengan demikian negara lainnya akan kembali menyesuaikan berbagai kebijakannya dan terus bergulir dan membentuk sebuah pola perlombaan persenjataan atau arms race dengan tujuannya adalah membangun superioritas atas negara lain, khususnya negara rival.

- b. Kebijakan pertahanan akan dapat membangun kepemimpinan dari negara-negara sekutu.

Pengembangan kebijakan pertahanan akan menumbuhkan terbentuknya pola kerjasama pada negara-negara sekutu dan kemudian membentuk tatanan baru yang dikenal dengan pakta pertahanan (*pact of defense*). Kondisi ini kemudian menimbulkan dependensi dan pengikutan negara-negara sekutu terhadap negara superior yang berujung pada terbentuknya negara satelit.

- c. Kebijakan pertahanan akan dapat membangun kontra perluasan sekaligus meminimalisasi potensi konflik dan ketegangan baru yang akan memperbesar kekuatan dan sikap antisipatif dari lawan.

Kebijakan pertahanan dirumuskan untuk mengantisipasi kebijakan pertahanan lawan dan membangun kekuatan pertahanan pihak kawan (sekutu). Kondisi yang berlarut-larut tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak lain membuat berlarut-larutnya persaingan antara dua negara yang saling berseteru melalui penyesuaian anggaran pertahanan, jumlah personel militer dan lain-lainnya yang menyebabkan ketegangan dan perlombaan persenjataan dalam jangka panjang, serta menyebabkan ketegangan, potensi konflik dan pecahnya konflik. (Buzan and Weaver, 2002:37)

Barry Buzan juga menyatakan bahwa kebijakan pertahanan yang diterapkan oleh suatu negara akan selalu berkaitan dengan *grand policy*, yaitu kebijakan politik luar negeri. Pada banyak kasus kebijakan pertahanan merupakan

tindak lanjut sebagai bagian dari skema politik luar negeri untuk menangani persoalan-persoalan lama yang sudah terpetakan. Artinya jika negara pelaksana mengeluarkan kebijakan pertahanan, maka persoalan ini sebenarnya telah lama terjadi dan umumnya telah menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman dan pembelajaran secara politik.(Buzan and Weaver,2002:38-39)

Dalam kebijakan pertahanan terdapat dua komponen penting yaitu *securitizing actors* dan *referent objects*. *Securitizing actors* didefinisikan sebagai 'aktor yang membuat sebuah isu menjadi isu keamanan dengan cara mendeklarasikan sesuatu sebagai *referent objects* yang terancam eksistensialnya'. *Securitizing actors* dapat berupa pemimpin politik, birokrasi, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan. *Referent objects* adalah 'hal-hal yang dianggap terancam keberadaannya dan yang memiliki klaim sah untuk bertahan hidup '. *Referent objects* dapat berupa negara (keamanan militer), kedaulatan nasional atau ideologi (keamanan politik), ekonomi nasional (keamanan ekonomi) dan identitas kolektif (keamanan sosial).

D. Penerapan Teori Dalam Penelitian

Teori kebijakan pertahanan yang dikemukakan Barry Buzan relevan dengan agresivitas China dalam konflik Laut China Selatan yang menunjukkan bahwa respons Jepang dalam menghadapi agresivitas Tiongkok merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepentingan nasional, yaitu stabilitas keamanan. Dengan kata lain Jepang akan terancam atas aktifitas modernisasi bidang pertahanan China karena dua negara tersebut bukan merupakan sekutu. Dalam

menyeimbangkan agresifitas China, maka Jepang juga menyesuaikan kebijakan pertahanannya dengan membangun grand policy yaitu re-orientasi kebijakan pertahanan dari sistem yang pasif menjadi sistem pertahanan aktif dengan harapan Jepang dapat lebih berkontribusi dalam perdamaian dunia, terlebih lagi dari sisi perekonomian merupakan salah satu yang terkuat di dunia.

Respon Jepang dalam menghadapi agresivitas China dijalankan dengan membangun kekuatan kolektif dengan negara-negara sekutu, serta sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan lawan sebagai kontra perluasan kebijakan lawan. Lebih lanjut dikaitkan dengan proposisi Barry Buzan bahwa respons Jepang dalam menghadapi agresivitas China dijalankan dengan membangun kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar dan membangun superioritas sistem pertahanan yang diwujudkan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kedua negara ini memiliki kepentingan yang sama dengan Jepang dalam menyingkapi konflik LCS dan melalui kerjasama maka Jepang akan dapat membangun kekuatan kolektif sebagai upaya penting untuk dapat menyeimbangkan kekuatan dengan agresifitas China di LCS.

Kerjasama luar negeri antara Jepang, serta Amerika Serikat dan Korea Selatan pada tahun 2018-2020 diwujudkan melalui program latihan bersama dengan mengerahkan alutsista terkini. Kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan kesiapsiagaan dari personel negara-negara yang terlibat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yaitu perang secara terbuka. Selain itu, kerjasama ini juga diwujudkan dengan pengembangan sistem persenjataan mutakhir karena konflik LCS merupakan persetujuan non-

konvensional dengan melibatkan berbagai teknologi persenjataan canggih, khususnya laut dan udara.

E. Hipotesa

Melalui uraian kerangka dasar teori maka dapat ditarik hipotesa bahwa respons Jepang dalam menghadapi agresivitas Tiongkok dalam konflik Laut China Selatan tahun 2018-2020 diwujudkan dalam :

- a. Penerapan kebijakan keamanan dan militer melalui re-orientasi pertahanan melalui doktrinasi pertahanan pasif menjadi pertahanan aktif, pengembangan, serta melalui rasionalisasi anggaran pertahanan.
- b. Membangun terobosan hubungan luar negeri dengan negara-negara sekutunya untuk memperkuat bidang pertahanann dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitik beratkan pada analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.(Surakhmad,1989:140-141)

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan penelitian. (Surakhmad,1989:140-141) Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan respon Jepang dalam menghadapi agresifitas China dalam konflik Laut China Selatan tahun 2018-2020.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah dan menganalisa tentang respon Jepang dalam menghadapi agresifitas China dalam konflik Laut China Selatan tahun 2018-2020.
2. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta pihak-pihak yang membutuhkan tentang dinamika pertahanan-keamanan di wilayah Laut China Selatan tahun 2018-2020.
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana ilmu politik dengan spesialisasi program studi hubungan internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini penulis memberikan batasan penelitian pada tahun 2018-2020. Dipilih periode dua tahun tersebut karena menunjukkan perkembangan terkini tentang agresifitas China dalam konflik Laut China Selatan yang kemudian direspon secara serius oleh pemerintah Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Perdana Menteri Yoshihide Suga. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevansian dengan tema yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, penerapan teori dalam penelitian, hipotesa, metode penelitian, teknik pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisi tentang gambaran profil pertahanan Tiongkok, dinamika konflik di wilayah LCS meliputi sejarah dan perkembangannya, serta agresifitas Tiongkok di wilayah LCS.

BAB III merupakan bab yang membahas tentang respon Jepang dalam menghadapi agresifitas China dalam konflik Laut China Selatan tahun 2018-2020 diwujudkan dalam kebijakan keamanan dan militer yang diwujudkan melalui re-

orientasi pertahanan dan membangun terobosan hubungan luar negeri dengan negara-negara sekutunya, khususnya Amerika Serikat.

BAB IV merupakan bab berisi kesimpulan dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya